

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya manusia untuk memecahkan persoalan perang dan damai telah dianggap sebagai metode manusia yang paling tua. Dalam menjalankan hubungan antara masyarakat agar terorganisasi, dibutuhkan alat untuk menunjang pencapaian keberhasilan hubungan antar negara yang biasa disebut dengan diplomasi. Diplomasi merupakan satu alat negara yang digunakan dalam pelaksanaan politik luar negeri dan pencapaian kepentingan nasional yang kemudian dapat menjadi nilai tawar atau *state branding* suatu negara sehingga mampu membangun citra atau *image* negara. Diplomasi juga sebuah usaha untuk meyakinkan pihak atau negara lain untuk dapat memahami dan membenarkan pandangan kita dan mendukung pandangan kita itu tanpa perlu menggunakan kekerasan. Salah satu contoh diplomasi yang dilakukan Korea Selatan ialah dengan membentuk kebijakan luar negeri baru yaitu *New Southern Policy* (NSP).

Secara diplomatis, Moon Jae In selaku Presiden Korea Selatan telah menepati janjinya selama masa jabatannya untuk mengunjungi semua negara anggota ASEAN dengan melakukan kunjungan ke Indonesia dan Filipina pada November 2017, Vietnam pada Maret 2018, Singapura pada Juli 2018, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Kamboja pada Maret 2019, serta Thailand, Myanmar, dan Laos pada September 2019. Walaupun pada tahun 2019 terdapat halangan dalam kunjungan yaitu menyebarnya Virus Corona ke hampir seluruh dunia termasuk Korea dan ASEAN. Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Dengan adanya virus ini, tidak memutuskan semangat Moon Jae In dalam menyelesaikan visinya dengan mengunjungi

negara-negara di ASEAN. Dalam pertemuan itu, Moon Jae In menyampaikan kebijakan luar negeri baru yang akan diterapkan oleh Korea Selatan di beberapa tahun kedepan, yaitu Kebijakan Baru Korea ke Arah Selatan atau biasa dikenal dengan *New Southern Policy* (NSP). NSP secara resmi dideklarasikan oleh Presiden Moon pada ROK-Indonesia Business Forum pada 9 November 2017. Alasan Presiden Moon menerapkan kebijakan NSP ini karna merasa kebijakan Luar Negeri Korea Selatan selalu berfokus terhadap negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan Rusia. Sehingga Moon merasa juga harus memperluas hubungan dengan negara-negara di Asia Tenggara dan India untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara-negara besar. Tujuan dari kebijakan *New southern Policy* sendiri adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian bersama di dunia di luar Asia Timur serta Semenanjung Korea dengan memperkuat hubungan dengan ASEAN dan India. Moon menekankan bahwa Korea Selatan bertujuan untuk "diplomasi yang lebih seimbang," bukan dengan menurunkan hubungan dengan kekuatan besar, tetapi dengan meningkatkan hubungan dengan mitra regional Indo Pasifik (Sohn, 2017).

Presiden Moon Jae In mengunjungi Vietnam pada Maret 2018 dan Singapura pada Juli 2018 untuk memenuhi janjinya mengunjungi semua negara anggota ASEAN untuk menerapkan kebijakan *New South Policy*. (Sungnam, 2019). Kunjungan pemerintah Korea Selatan ke Singapura mendapat sambutan hangat dan dukungan penuh dari Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, yang menginginkan lebih banyak langkah untuk denuklirisasi Semenanjung Korea, dan pemerintah Singapura bersedia memainkan perannya dalam upaya perdamaian yang secara alami akan tetap berada koridor Dewan Keamanan PBB (Bei Yi, 2018). Uniknya, tidak hanya ASEAN yang menjadi objek sasaran Korea Selatan, tetapi India yang bukan bagian dari ASEAN ternyata juga menjadi negara target kebijakan New South dan bersama ASEAN menjadi agenda diplomasi utama politik luar negeri (Ferrier, 2019).

Agenda promosi *New Southern Policy* terus berlanjut hingga Maret 2019 dimana Presiden Moon melakukan *three-days state visit* ke negara-negara anggota ASEAN yakni Malaysia, Kamboja dan Brunei Darussalam (Parameswaran, 2019). Tahun 2019 merupakan tahun peringatan 30 tahun kerjasama antara Korea Selatan dan ASEAN, sehingga pemerintah Korea Selatan merayakannya pada tanggal 25-26 November. Pertemuan Peringatan Republik ASEAN-ROK di Busan, Korea Selatan pada November 2019, dilanjutkan dengan "KTT MEKONG-ROK" yang diadakan pada 27 November 2019 (Parameswaran, 2019).

Park Tae Sung, Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, mengatakan Indonesia adalah ekonomi terbesar ASEAN dan mitra penting NSP. Santo Darmosumarto, Direktur Kawasan Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, juga mengatakan bahwa NSP membuka peluang bagi Indonesia. Salah satunya melalui Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA). IK-CEPA ditandatangani pada 18 Desember 2020 oleh Menteri Perdagangan RI Agus Suparmanto dan Menteri Perdagangan, Industri, dan Energi Korea Selatan Sung Yun-mo. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. Semua inisiatif ini mewakili kepercayaan dan keinginan Seoul yang semakin besar untuk memproyeksikannya status *middle power* (Choe, 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil untuk penelitian ini adalah bagaimana Strategi Korea Selatan dalam mengimplementasikan Kebijakan *New Southern Policy* terhadap ASEAN pada tahun 2019-2021.

1.3 Landasan Teori

Untuk menjelaskan latar belakang masalah dan kemudian menjawab pokok permasalahan maka dalam landasan teori ini penulis menggunakan Konsep Diplomacy dan Konsep Soft Power. Penulis memandang konsep ini relevan dengan kasus yang sedang di bahas, karena dapat menjelaskan bagaimana Strategi Korea Selatan dalam Kebijakan *New Southern Policy* terhadap ASEAN pada tahun 2019-2021.

1.3.1 Konsep Diplomasi

Kata diplomasi memiliki dua arti yang berbeda. Pertama, kata diplomasi dipahami sebagai kata lain dari kebijakan luar negeri. Kedua, kata diplomasi berarti negosiasi (perundingan). Istilah ini merujuk pada peristiwa perundingan internasional, baik dua arah antara dua negara (bilateral) maupun multi arah (multilateral), yang melibatkan beberapa negara (Latief, 2014). Diplomasi secara umum dapat dipahami sebagai cara mengelola hubungan antar-bangsa melalui jalan perundingan. Tujuan utama diplomasi sendiri adalah untuk menemukan solusi atas isu yang timbul dalam hubungan antara negara dengan mengutamakan perundingan untuk menghindari kemungkinan penggunaan kekerasan yang bisa merugikan banyak pihak (Cipto, 2016).

Dalam bukunya, Djelantik memberikan definisi paling dekat tentang metode dan isi diplomasi. Menurutnya, diplomasi merupakan tekanan politik, ekonomi dan militer terhadap negara-negara yang terlibat dalam kegiatan diplomasi, yang dilakukan melalui pertukaran permintaan dan konsesi oleh negosiator. Diplomasi dapat dilakukan dalam pertemuan khusus atau konferensi umum. Diplomasi juga diartikan sebagai upaya untuk mengubah kebijakan, tindakan, tujuan dan sikap pemerintah negara lain dan diplomatnya melalui persuasi, menawarkan hadiah, bertukar konsesi atau mengirimkan ancaman (Djelantik & Sukawarsini, 2012).

Tugas diplomasi adalah mendamaikan, setidaknya mendamaikan kepentingan-kepentingan yang berbeda ini. Fungsi utama dari diplomasi sendiri adalah negosiasi. Tugas diplomasi adalah menyelesaikan perbedaan pendapat dan memastikan kepentingan negara melalui negosiasi yang berhasil. Jika negosiasi gagal, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik besar, yaitu perang antar negara (Kuswandoko, 2016).

Hal inilah yang dilakukan Korea Selatan dalam upayanya mencapai kepentingan nasional melalui diplomasi yang diterapkannya. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir Korea Selatan membangun opini khalayak atau publik internasional yang positif terhadap negaranya sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan dalam politik internasional karena negara lain dapat mengikuti, mengagumi nilai yang dimiliki Korea Selatan serta menirunya. Studi ini sejauh ini berpendapat bahwa Kebijakan Selatan Baru pemerintahan Moon Jae-In adalah sebuah awal baru untuk memperkuat hubungan diplomasi ASEAN-Korea. Itu sepatutnya mencerminkan apa yang telah hilang di politik luar negeri Korea sebelumnya dan kebijakan terhadap ASEAN.

1.3.2 Konsep Soft Power

Konsep kekuasaan atau *power* sebagaimana dijelaskan oleh Max Weber Power adalah kemampuan seseorang untuk memperoleh kepatuhan dari kelompok lain sehingga kelompok lain bertindak sesuai dengan keinginan pemilik kekuasaan. Menurut Max Weber ada sumber kekuasaan yaitu: fisik, uang, tingkatan/pangkat/status dan pengaruh spiritual. (Lebow, 2017).

Menurut Nye, *soft power* adalah kemampuan suatu negara untuk mencapai kepentingan yang diinginkannya secara persuasif melalui berbagai perspektif, seperti sosial, budaya, dan nilai. Tidak dengan kekerasan, agar tidak menimbulkan permusuhan, perpecahan atau bahkan peperangan (Suryani, 2014). Mengembangkan kebijakan *New Southern Policy* sebagai alat *soft*

power Korea Selatan, merupakan bentuk diplomasi yang efektif untuk memperluas pengaruhnya secara internasional (Sendow, 2018).

Soft power diplomacy, didefinisikan sebagai pertukaran ide, pengetahuan, seni, dan aspek budaya lainnya antara negara dan masyarakat dengan harapan membangun saling pengertian. Konsep ini membuat aktor atau negara A memahami dan memahami apa yang diinginkan dan diharapkan dari aktor atau negara B, selain itu juga perlu melihat kekuatan negara A. Keberhasilan diplomasi *soft power* sangat bergantung pada reputasi aktor tersebut, masyarakat internasional dan pertukaran informasi (Mukti, 2013).

Soft diplomacy berasal dari *soft power diplomacy* sebagai lawan dari hard diplomacy. *Soft power* adalah kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan suatu negara (daerah) dengan menunjukkan bangsanya di mata negara lain, bukan melalui paksaan atau pembayaran. Hakikat *soft power* terletak pada kajian kekuatan budaya non militer dan ekonomi suatu bangsa baik sebagai alat maupun sarana untuk melakukan diplomasi dengan negara lain (Mukti, 2013).

Analisis penggunaan soft power itu sendiri bagi Korea Selatan telah membuahkan beragam kajian di bidang diplomasi. Untuk memajukan NSP, ROK perlu mengembangkan ekonomi yang lebih luas keterlibatan di seluruh negara anggota ASEAN untuk mengatasi konsentrasi yang berlebihan, mendorong pertukaran dua arah yang meningkatkan akses pasar ASEAN dan promosi budaya di ROK, dan mengartikulasikan ide yang koheren tentang regional kerjasama yang mendukung mekanisme yang dipimpin ASEAN dan terbuka, inklusif dan arsitektur regional berbasis aturan. Selain integrasi pilar politik Korea Selatan ke dalam struktur komunitas ASEAN, kerangka kerja baru juga dirancang untuk meningkatkan investasi di negara-negara ASEAN dan meningkatkan serta memperluas kerangka kerja ASEAN saat ini. Korea Selatan juga berupaya mempertahankan pendekatan regional-bilateral untuk memenuhi keinginan *New South Policy* (NSP) untuk memperdalam kemitraan antara Korea Selatan dan ASEAN.

1.4 Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Strategi yang digunakan Moon Jae In untuk mengimplementasikan 3 pilar *New Southern Policy* yaitu dengan mempererat kebijakan sosial budaya, kebijakan ekonomi, dan kebijakan politik keamanan.
2. Moon Jae In memperkenalkan *New Southern Policy Plus* sebagai tanggapan atas perubahan lingkungan setelah pandemi Covid-19.

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi kebijakan luar negeri baru Korea Selatan yaitu *New Southern Policy* di bawah pemerintahan Moon Jae In yang berdampak pada negara-negara ASEAN.

1.6 Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Pengertian Metode Penelitian Kualitatif Dalam buku “Metodologi Penelitian Kualitatif” karya Bongdan dan Taylor, metodologi penelitian kualitatif menjelaskan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang-orang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati. (Moleong, 2008).

Pendekatan ini juga mendeskripsikan bagaimana sebuah kebijakan Negara dapat mempengaruhi keadaan negara lain. Data-data yang diperoleh tidak berupa angka-angka, tetapi berupa kualitas bentuk-bentuk verbal yang berwujud tuturan. Dalam karya ini, penulis menggunakan bahan sekunder yaitu. informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan melalui

literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informasi yang terkumpul bersifat kualitatif, yang kemudian dianalisis, dimana penulis merespon permasalahan berdasarkan fenomena dan informasi yang diperoleh penulis.

1.7 Jangkauan penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, maka jangkauan penelitian dengan bahasan Strategi Korea Selatan dalam Kebijakan *New Southern Policy* ini dibatasi dengan rentang tahun 2019-2021.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian kali ini, Penulis membagi sistematika penulisan ke dalam 4 bab yang terdiri dari substansi-substansi sebagai berikut:

BAB I. Terdapat penjelasan mengenai latar belakang adanya penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rumusan masalah dan tujuan penelitian, lalu kerangka pemikiran yang disertai dengan sintesa pemikiran, dan argumen utama penulis serta metodologi penelitian yang digunakan penulis.

BAB II. Dalam bab ini akan ada penjelasan lebih dalam mengenai alasan munculnya kebijakan *New Southern Policy*.

BAB III. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai strategi Korea Selatan dalam kebijakan *New Southern Policy* di ASEAN dengan signifikansi kerjasama ekonomi ROK-ASEAN, Tren budaya Korea di negara-negara selatan, dan isu politik keamanan kawasan yang akhirnya mendorong keberlangsungan kebijakan *New Southern Policy*.

BAB IV. Analisis penulis yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan beserta kritik dan saran dari penulis terkait dengan kebijakan *New Southern Policy*.